

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
(Studi Kasus Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018)**

***THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF POLITICAL PARTY FINANCIAL ASSISTANCE IN
THE IMPLEMENTATION OF THE POLITICAL EDUCATION PROGRAM
(Case Study of the Golkar Mongondow Regency Party Group of Work in 2018)***

Gabriel Marjulando Tangkere⁽¹⁾, Daud Markus Liando⁽²⁾, Johny Pieter Lengkong⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: tangkeremarcel@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Rabu, 17 November 2021
Disetujui diterbitkan : Minggu, 28 November 2021

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the use of political party financial assistance in the implementation of the political education program of the DPD II Golkar Bolmong Party in 2018. The research was carried out at the Secretariat Office of the DPD II Golkar Party, Bolaang Mongondow Regency. The method used in this research is a qualitative research method. Sources of research data consist of primary data and secondary data that are focused on aspects of effectiveness, namely aspects of tasks and functions, aspects of plans or programs, aspects of provisions and regulations, and aspects of goals and ideal conditions. The research informants amounted to 5 informants consisting of the Secretary of the DPD II Golkar Bolmong Party, the Treasurer of the DPD II Golkar Bolmong Party, the Chair of the Cadreization and Membership of the Golkar Bolmong Party, the Head of Education and Scholars, and the Chairman of the PK DPD II Golkar Bolmong Party. Data was collected by means of observation, interviews and documentation which were analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The validity of the data is done by triangulating the data. The results showed that the effectiveness of political party financial assistance from the aspect of tasks and functions as well as aspects of the plan or program had not been effective, then from the aspect of the provisions it was effective but from the regulatory aspect as well as the aspect of objectives or ideal conditions it was not yet effective.

Keywords : effectiveness; finance; political parties

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam pelaksanaan program pendidikan politik DPD II Partai Golkar Bolmong Tahun 2018. Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang difokuskan pada aspek-aspek efektifitas yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, serta aspek tujuan dan kondisi ideal. Informan penelitian berjumlah 5 informan yang terdiri dari Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong, Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong, Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Bolmong, Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan, dan Ketua PK DPD II Partai Golkar Bolmong. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan keuangan partai politik dilihat dari aspek tugas dan fungsi juga aspek rencana atau program belum efektif, kemudian dilihat dari aspek ketentuan sudah efektif namun dari aspek peraturan juga aspek tujuan atau kondisi ideal belum efektif.

Kata kunci : efektivitas; keuangan; partai politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Khusus Paratai Politik adalah : Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan; membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain memiliki tujuan, partai politik pun memiliki fungsi yang cukup penting, hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat (1) yaitu : Partai Politik berfungsi sebagai sarana : Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Oleh sebab itu partai politik harus mampu mengatasi masalah keuangan internal, jika mau memaksimalkan tugas sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah, karena ketersediaan anggaran adalah hal yang vital sebab dana tidak hanya pada masa pemilu, akan tetapi juga membiayai kegiatan parpol rutin tahunan yang meliputi oprasional kantor/sekretariat. Kaderisasi dan pendidikan politik dan konsolidasi organisasi dan perdis fungsionaris proses politik ini tidak dapat berjalan tanpa keuangan/anggaran.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari tiga sumber yaitu : Iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan; bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Prioritas penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Pasal 34 ayat (3a) UU No 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3b) menyatakan bahwa Pendidikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan; Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Nominal bantuan keuangan kepada partai politik termaksud dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 5 Besar Bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR RI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. Sedangkan besaran nilai bantuan keuangan kepada paratai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara dan untuk besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara. Bantuan keuangan bagi partai yang mendapatkan kursi di DPR bersumber dari APBN, partai yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi bersumber dari APBD Provinsi dan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Prioritas penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik juga diatur dalam PP No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pasal 9 ayat (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat. Meskipun Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diprioritaskan untuk membiayai fungsi pendidikan politik untuk kader partai dan masyarakat, masih banyak partai politik sekarang ini yang tidak mampu untuk menunjuk kadernya sendiri dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan pilkada.

Sebagai partai yang berhasil meraih 5 Kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam pemilu 2014 dengan perolehan suara 20.218 suara sah, Partai Golkar Bolmongo menjadi salah satu partai yang menerima bantuan Keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolmong. Besaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolmong untuk partai Golkar Bolmong Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 77.131.670,00 (tujuh puluh juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 77.140.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik bersumber dari APBD Bolmong dari Partai Golkar Bolmong diprioritaskan pada dua kegiatan yaitu pendidikan partai politik dan oprasional sekretariat. Berdasarkan LPJ Dana Bantuan Keuangan Partai Poltik dari pemerintah Kabupaten Bolmong Tahun Anggaran 2016 Partai Golkar Bolmong, besaran dana yang diugunakan untuk *item* kegiatan Pendidikan Politik berupa Dialog Interaktif sebesar Rp. 47.000.000 dan untuk kegiatan oprasional sekretariat sebesar Rp. 30.131.670 dan berdasarkan LPJ Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima partai Golkar Bolmong pada tahun 2018 membiayai kegiatan Pendidikan politik dalam bentuk diskusi panel sebesar Rp. 59.690.000,00. Dan besaran dana yang digunakan untuk oprasioanal sekretariat sebesar Rp. 17.450.000,- untuk membiayai Adminitrasi umum sekretariat seperti keperluan ATK, rapat internal sekretariat, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik dan transportasi dalam rangka mendukung kegiaiatan oprasional sekretariat.

Partai Golkar Bolmong sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 baru melaksanakan dua kegiatan sebagai program dari Pendidikan Politik yaitu Dialog Interaktif dan Workshop Pendidikan Politik, tujuan dari dilaksanakannya

kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan kader mereka untuk maju dalam pemilu 2019, agar supaya setiap kader yang maju sebagai calon legislatif dalam pemilu dapat mensosialisasikan partai dan dirinya yang maju dalam pemilu kepada masyarakat. Namun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai Golkar Bolmong belum maksimal selain terbatasnya peserta yang dihadirkan dalam kegiatan, waktu pelaksanaan yang singkat juga menjadi faktor pendidikan politik yang dibuat tidak terlaksana dengan maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana efektivitas penggunaan bantuan keuangan politik dalam pelaksanaan program pendidikan politik DPD II Partai Golkar Bolmong Tahun 2018?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan bantuan keuangan politik dalam pelaksanaan program pendidikan politik DPD II Partai Golkar Bolmong Tahun 2018.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pengelolaan sumberdaya pembangunan khususnya dalam tata kelola pemilu.
2. Manfaat Praktis
Dapat memberikan sumbangsi pemikiran, terkait pengembangan studi mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, lebih khsusus terkait efisensi penggunaan anggaran serta sebagai bahan evaluasi bagi bagi pemerintah dalam pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, agar lebih efisien kedepannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moelong dalam Ibrahim (2015), pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berasumsi bahwa *subject matter* dari ilmu alamiah dan mempersyaratkan tujuan yang berbeda untuk inkuiri dan seperangkat penelitian yang berbeda pula. Cara kerjanya bersifat induktif, yang berisi nilai-nilai subjektif, holistik dan berorientasi pada proses. Karena itu pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran yang holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam tentang suatu objek yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara (Bungin, 2013).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan baik dalam bentuk dokumen yang tertulis maupun foto/gambar. Atau sumber data kedua sesudah sumber data primer. Meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Ibrahim, 2015).

Fokus Penelitian

Fokus yang dipilih menjadi pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif dengan menentukan fokus, seorang peneliti sudah membatasi kajiannya hanya pada apa yang menjadi pilihan fokusnya, dan tidak mengkaji selain fokus yang telah dipilih/ditentukan (Ibrahim, 2015).

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Politik DPD II Partai Golkar Bolaang Mongondow yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBN. Untuk melihat Efektivitas Program peneliti menggunakan Konsep yang dikutip oleh Muasaroh (2010), yaitu melihat Efektivitas dari aspek-aspek antara lain :

1. Aspek Tugas dan Fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya.
2. Aspek Rencana atau Program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek Ketentuan dan Peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan dirinya.
4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat tercapai.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti. Menurut Bungin (2013), penentuan informan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan *key informan* atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong
2. Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong
3. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Bolmong
4. Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan
5. Ketua PK DPD II Partai Golkar Bolmong

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi Partisipatif
Dalam melakukan observasi peneliti mengikuti beberapa kegiatan dilapangan untuk lebih mudah mengamati. Dalam hal ini untuk proses penelitian di DPD II Partai Golkar Bolmong.
2. Wawancara
Wawancara menurut Moleong dalam Ibrahim (2015), adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan demikian wawancara adalah pertemuan diantara dua orang untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia baik foto maupun bahan statistik (Ibrahim, 2015).

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa model Milles dan Huberman (2009), terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituaangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam tahap penelitian ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting data yang digunakan dan dicantumkan dalam penelitian tersebut mengenai Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik DPD II Partai Golkar Bolaang Mongondow.

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada akhirnya data yang muncul dalam penelitian ini adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian ini terkait Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik DPD II Partai Golkar Bolaang Mongondow.

2. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap penelitian ini peneliti menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk uraian, dan sejenisnya yang berkaitan dengan Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik DPD II Partai Golkar Bolaang Mongondow.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan, valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data (Moleong, 2015). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. (Sugiono, 2013). Untuk kepentingan pengumpulan data secara lengkap peneliti menggunakan dua macam triangulasi pada penelitian ini yaitu :

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiono, 2013).

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bolmong

Kepemimpinan Partai Golkar Bolmong saat ini dipimpin oleh Rubby Rumpesak SH, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pasca Meninggalnya Ketua DPD II Partai Golkar Bolmong Alm. Hi. Abdul Kadir Mangkat. Dengan sekretaris Fadly Simbuang yang dulunya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Fadly Simbuang menggantikan Alm. Marthen Tangkere, SE, MAP dikarenakan meninggal dunia.

Tabel 1. Pengurus Inti DPD II Partai Golkar Bolmong

NO	NAMA	JABATAN
1	Rubby Rumpesak, SH	Ketua
2	Fadly Simbuang	Sekretaris
3	I Ketut Sukadi, SE	Bendahara
4	Fadly Simbuang	Ketua Bidang Organisasi
5	Sulhan SE, SH.	Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
6	Kisman Papatungan, SH	Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
7	Djenli W.F. Taturu	Ketua Bidang Koperasi, Wiraswasta & UMKM
8	Ridwan Nakoko	Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan
9	Rafiq Mokodongan	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
10	Ratna Django	Ketua Bidang Seni dan Budaya
11	Henny S. Kandouw	Ketua Bidang Kerohanian
12	Hi. Rahmat Sumarsono	Ketua Bidang Tani dan Nelayan
13	Harpian Adam Latela	Ketua Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal
14	Mursit Potabuga	Ketua Bidang Hukum dan HAM
15	Riduan Abdul, ST. SH	Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga
16	Supardi Pudul	Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini

Pembahasan Penelitian

Dalam mengajukan bantuan keuangan, dewan pimpinan daerah partai politik tingkat kabupaten harus menyampaikan pengajuan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah atau harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten. Mekanisme Pengajuan Bantuan Keuangan untuk Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut : 1). Surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stemple Partai Politik; 2). Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik; 3). Fotocopy Surat NPWP; 4). Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten; 5). Fotocopy nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 6). Rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; 7). Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; 8). Surat

pernyataan dari ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan lainnya diatas meterai yang menggunakan kop surat partai politik. Bantuan keuangan kepada partai politik akan diserahkan setelah pengajuan bantuan keuangan memenuhi persyaratan, penyerahan bantuan keuangan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD II Partai Golkar Bolaang Mongondow Tahun 2018 yang bersumber dari APBN/APBD. Peneliti menggunakan Konsep yang dikutip oleh Muasaroh (2010), yaitu melihat efektivitas dari beberapa aspek-aspek, yakni :

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Besaran bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD kabupaten Bolmong untuk partai Golkar Bolmong sebesar 77.140.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah). Partai Golkar Bolmong memprioritaskan Bantuan Keuangan Tahun 2018 pada dua kegiatan yaitu pendidikan partai politik dan Oprasional secretariat. Berdasarkan LPJ Dana Bantuan Keuangan Partai Poltik dari pemerintah kabupaten Bolmong Tahun Anggaran 2018 Partai Golkar Bolmong, besaran dana yang diugunakan untuk item kegiatan Pendidikan Politik berupa Workshop dalam bentuk diskusi panel sebesar Rp. 59.690.000,00. Jumlah dana ini hanya membiayai satu jenis kegiatan padahal ada lima jenis kegiatan untuk pelaksanaan pendidikan politik yang seharusnya didanai dengan bantuan keuangan partai politik, seperti Seminar, Loka Karya, Dialog Interaktif Sarasehan dan Workshop.

Hal ini dibenarkan melalui hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong Bapak Fadli Simbuang, beliau mengatakan bahwa :

“Bantuan keuangan yang diberikan pada partai golkar bolmong hanya dapat menunjang satu kegiatan saja yakni kegiatan workshop, karena memang bantuan keuangan hanya mampu menunjang kegiatan tersebut padahal masih ada banyak kegiatan yang harus dilaksanakan partai sebagai implemetasi tugas dan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik. Dan karena keterbatasan anggaran ini kami belum bisa melibatkan masyarakat umum untuk ikut dalam

kegiatan pendidikan politik ini padahal sebenarnya bantuan keuangan ini juga bertujuan untuk menunjang kegiatan partai terkait mengedukasi masyarakat mengenai sistem politik dan partisipasi politik.”

Peneliti juga mewawancarai Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong Bapak I Ketut Sukadi mengenai Efektivitas Bantuan Keuangan untuk menunjang kegiatan partai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi partai, beliau mengatakan :

“Bantuan keuangan partai politik ini tidak cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan partai, karena memang hanya sedikit yang diberikan, sedangkan kegiatan partai politik dalam rangka pelaksanaan fungsi partai ada sangat banyak. Karena selain membiayai kegiatan partai bantuan keuangan parpol ini juga untuk membiayai oprasional kesekretariatan, jadi masih sangat tidak cukup. Selain itu kegiatan yang kami laksanakan dengan menggunakan bantuan keuangan partai politik hanyalah kegiatan pendidikan politik yang dilakukan di kabupaten tidak dilakukan diluar daerah karena terbatas dengan anggaran yang ada. Kami juga sering menggunakan dana fraksi dalam menunjang kegiatan partai yang dianggap penting dan harus dilaksanakan tanpa berharap pada bantuan keuangan partai politik. jadi secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa bantuan keuangan partai politik ini belum efektif untuk menunjang kegiatan partai dalam pelaksanaan fungsi partai.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mahrin Lolung Ketua PK DPD II Golkar Bolmong, beliau mengatakan :

“Sejujurnya bantuan keuangan masih sangat tidak cukup, bahkan kami hampir tidak merasakan dampak dari bantuan keuangan partai politik ini, karena sepengetahuan saya banyak kegiatan partai golkar bolmong yang dibayai oleh dana fraksi bukan bantuan keuangan partai politik, karena memang tidak akan cukup. Padahal jika bantuan keuangan ini dinaikan akan bisa mengakomodir kegiatan strategis partai dalam rangka pendikan politik dan rekrutmen partai politik yang memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, contohnya kegiatan yang sangat berdampak bagi partai pun kami yang ada di pengurus kecamatan yang sudah lama tidak dilaksanakan yaitu Karaktedes. Dimana kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kader terkait partai politik dan strategi pemenangan pemilu yang dilaksanakan sampai di tingkat desa, namun karena terbatasnya keuangan partai, kegiatan ini sudah lama tidak dilaksanakan.”

Dari hasil wawancara dengan para informan diatas, dapat dikatakan bahwa efektivitas bantuan keuangan partai politik dilihat dari aspek tugas dan fungsi belum efektif, karena besaran bantuan keuangan partai politik tidak dapat menunjang teralaksananya kegiatan Pendidikan politik partai golkar bolmong, dimana bantuan keuangan hanya dapat mengakomodir satu kegiatan saja dan itupun tidak terlaksanakan secara maksimal. Selain waktu yang hanya dipersingkat kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai golkar bolmong juga hanya menghadirkan anggota partainya saja tanpa melibatkan masyarakat luas, padahal ini menjadi penting untuk dilakukan dimana peran partai dalam mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya terlibat aktif dalam kegiatan berdemokrasi. Minimnya bantuan keuangan ini juga terlihat dari adanya beberapa kegiatan partai yang sangat berdampak bagi kader namun sudah tidak dilaksanakan lagi karena tidak cukupnya anggaran yang dimiliki partai.

2. Aspek Rencana atau Program

Dalam syarat penerimaan bantuan keuangan, partai politik harus memasukan rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik. Hal ini dikarenakan agar supaya penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peruntukannya, namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, didapati dalam laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik DPD II Partai Golkar Bolmong, partai golkar hanya merencanakan satu program saja untuk kegiatan pendidikan politik dikarenakan mengikuti besaran bantuan keuangan untuk pendidikan politik yang akan diterima oleh Partai Golkar Bolmong. Hal ini senada dengan yang di sampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong Fadli Simbung dalam wawancara yang dilakukan beliau mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan rencana program partai golkar bolmong, kami telah merencanakan beberapa kegiatan khusus untuk pendidikan politik, namun karena sesuai dengan aturan bahwa rencana penggunaan bantuan keuangan khusus untuk pendidikan politik hanya 60% dari besaran jumlah bantuan keuangan yang akan kami terima, dengan sangat terpaksa kami hanya memasukan satu item kegiatan saja, karena tidak mungkin kami memasukan semua rencana kegiatan yang telah kami siapkan, kemudian tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang akan kami dapat. Karena itulah kemudian kami hanya melaksanakan kegiatan workshop saja untuk pendidikan politik,

dan itu hanya melibatkan internal partai saja, padahal sebenarnya pendidikan politik yang dilakukan partai juga menasar warga masyarakat secara umum, namun mau bagaimana lagi anggarannya memang hanya cukup untuk mengahdirkan internal partai saja.”

Hal ini senada dengan hasil wawancara penelitian dengan Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Bolmong Bapak Sulhan, dari hasil wawancara didapati bahwa banyak program yang berjalan tidak sesuai dengan rencana dikarenakan terbatasnya dana atau anggaran yang dimiliki partai, dengan mengatakan bahwa :

“Program kerja sering tidak berjalan sesuai dengan rencana, bahkan pun sering tidak terlaksana, apalagi kegiatan yang memerlukan dana yang cukup besar, seperti konsolidasi partai sampai ke tingkat ranting, kegiatan ini hanya berjalan jika ada helatan pemilu, karena dibiayai secara individu. Karena jika hanya berharap di bantuan parpol, kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi, karena memang banpol (Bantuan Keuangan Partai Politik) itu hanya dapat membiayai satu atau dua kegiatan saja, yang berkaitan dengan pendidikan politik partai dan biaya sekretariat.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong Bapak Sukadi saat diwawancarai oleh peneliti terkait efektivitas bantuan keuangan partai politik dilihat dari aspek rencana atau program, beliau mengatakan :

“Pencairan bantuan keuangan partai politik ini nanti dilakukan pada akhir tahun, jadi bisa dikatakan banpol ini belum efektif dalam menunjang program-program dari partai golkar, apalagi program dari partai sangatlah banyak, dan bisa saya katakan banpol ini sering hanya digunakan untuk mengganti uang-uang pribadi yang sudah digunakan untuk menanggulangi kegiatan yang sudah terlaksana sebelum pencairan dana banpol tersebut. Bahkan di tahun sebelumnya partai melaksanakan program hanya menggunakan dana yang bersumber dari iuran anggota dan dana fraksi karena partai golkar bolmong sendiri di tahun 2017 tidak menerima bantuan keuangan partai politik.”

Terbatasnya bantuan keuangan partai politik yang diberikan kepada partai golkar bolmong mengakibatkan banyaknya program kerja partai yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaannya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan DPD II Partai Bolmong Bapak Ridwan Nakoko :

“Kegiatan Pendidikan politik yang kami rencanakan itu mencakup beberapa item kegiatan seperti Workshop, Seminar, Loka Karya, Dialog Interaktif dan Sarasehan. Namun karena bantuan keuangan tidak mencukupi, kami akhirnya hanya melaksanakan kegiatan Workshop yang dilakukan satu hari saja, padahal dalam perencanaan program kerja kami, pendidikan politik ini harus dilakukan dalam waktu paling cepat 3 hari dengan beberapa item kegiatan yang ada. Kegiatan yang tidak terakomodir oleh bantuan keuangan partai politik ini sering juga kami upayakan terlaksanakan dengan bermodalkan dana fraksi maupun sumbangan-sumbangan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan yang ada dapat dikatakan bahwa bantuan keuangan partai politik untuk partai golkar bolmong belum efektif dilihat dari aspek program karena bantuan keuangan ini belum dapat mengakomodir setiap program kerja yang sudah direncanakan oleh partai golkar bolmong dalam hal ini program pendidikan politik, dimana dari beberapa item kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik belum dapat dilaksanakan, selain itu juga pelaksanaan kegiatan pendidikan politik seperti workshop yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh partai.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPD II Partai Golkar Bapak Fadly, beliau mengatakan bahwa :

“Penggunaan bantuan keuangan partai politik kepada partai golkar sudah sesuai dengan aturan, karena bantuan keuangan ini digunakan untuk kegiatan pendidikan politik partai sebesar 60% dan 40% untuk oprasional sekretariat, tidak mungkin juga kami gunakan untuk kegiatan lain, sedangkan untuk kegiatan pendidikan politik saja tidak cukup, bahkan untuk penunjang sekretariat saja banyak menggunakan uang pribadi.”

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Sukadi selaku Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong, beliau mengatakan :

“Bantuan keuangan itu digunakan seusai aturan yang berlaku, yakni untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan penunjang oprasional sekretariat walaupun memang masih sangat tidak cukup, contohnya saja untuk penggunaan operasional sekretariat sebenarnya dalam aturan bantuan keuangan itu bisa digunakan untuk membayar gaji staf sekretariat, tapi boro-boro bayar gaji staf sekretariat sedangkan untuk SPPD saja sering menggunakan uang pribadi dulu baru diganti jika bantuan

keuangan itu sudah dicairkan, walaupun memang sebenarnya tidak boleh seperti itu, tapi mau bagaimana lagi jika tidak mengambil langkah seperti itu aktifitas atau roda organisasi tidak akan berjalan.”

Selain prioritas penggunaan anggaran bantuan keuangan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pemerintah juga sudah mengatur terkait pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik ini. Terkait pertanggungjawaban bantuan keuangan ini partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh pemerintah. Dan jika partai politik melanggar ketentuan aturan ini partai politik diberikan sanksi tidak dapat menerima bantuan keuangan tahun berikutnya.

Tujuan dari laporan pertanggungjawaban tersebut adalah untuk melihat bantuan keuangan yang diberikan pemerintah untuk partai politik dapat tepat sasaran, disiplin, dan transparan sehingga tidak ada lagi dugaan bahwa bantuan keuangan hanya dimanfaatkan oleh ketua ataupun pimpinan partai politik. Lemahnya pertanggungjawaban, pengelolaan dan pengendalian bantuan keuangan partai politik, menjadi sebuah persoalan yang penting dalam mewujudkan proses politik yang transparan. Pencatatan bantuan keuangan yang transparan dapat menunjukkan kepada publik mengenai kualitas dan komitmen dari partai politik dalam rangka mewujudkan upaya-upaya pencegahan terjadinya politik uang dalam tubuh partai politik.

Upaya untuk mencapai laporan bantuan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab maka diperlukan standar akuntansi dalam melakukan pelaporan keuangan. Agar laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami dan akuntabel. Laporan yang baik tersebut dapat dipergunakan secara maksimal oleh partai politik itu sendiri, pemerintah, penyumbang, dan juga memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat bagaimana cara partai politik mengelola bantuan keuangan partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong Fadly, beliau mengatakan :

“Kalau untuk sistem pelaporan harus menggunakan format tertentu sesuai dengan standar akuntan publik itu tidak diharuskan karena, syarat utamanya harus lengkap administrasi saja, apa yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah dana yang diterima hanya begitu saja tidak ada standar pelaporan, hanya pelaporan seperti biasa.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong Pak Sukadi, beliau mengatakan :

“Terkait mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, kami tidak diberikan format tertentu kami hanya menggunakan format yang sederhana saja, karena sampai saat ini sistem pelaporan hanya sebatas kelengkapan berkas, tidak diwajibkan untuk menggunakan format tertentu, yang harus itu besaran penerimaan dan pengeluarannya sesuai.”

Partai politik yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan partai politik yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan akan dikenakan sanksi yang tegas. Didalam UU partai politik sudah diatur mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 yang termuat dalam Pasal 47 ayat (3) menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenan.

Selain itu dijelaskan juga dalam PP No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PP No 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan “Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.”

Hal tersebut diperjelas lagi dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdapat

dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan “Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. Untuk mengetahui bagaimana ketaatan partai golkar bolmong terakait aturan mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, peneliti mewawancarai Bendahara DPD II Partai Golkar Bolmong Pak Sukadi, beliau mengatakan :

“Memang terkait LPJ kami sering kali terlambat menyapaikannya, itu dikarenakan karena memang bantuan keuangan ini sering dicairkan diakhir tahun dan itu menjadi kendala bagi kami untuk membuat pelaporannya, akhirnya penyampaian pelamporan itu dilakukan nanti tahun berikutnya. Karena itu juga yang menjadi penyebab kami sering menerima bantuan keuangan ini dua tahun sekali. Kaerna memang salah satu syarat untuk menerima bantuan keuangan adalah partai politik sudah lebih dulu menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Dan karena keterlambatan itulah kami sering tidak menerima bantuan keuangan tahun berikutnya, nanti kami terima dua tahun berikutnya. Saya kasih contoh LPJ tahun 2016 nanti disampaikan laporan pertanggungjawabannya tahun 2017 jadi kami baru menerima bantuan keuangan berikutnya pada tahun 2018.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong Fadly, beliau mengatakan :

“Kami memang sering terlambat melakukan pelaporan pertanggungjawaban, itu dikarenakan juga keterlambatan proses pencairan bantuan keuangan dari pemerintah, selain itu juga kami beberapa kali mengalami permasalahan internal yang berimbas pada terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai kami, hal ini juga merugikan kami sebagai partai, karena kami diberikan sanksi tidak menerima bantuan keuangan sebelum laporan pertanggungjawaban dimasukan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penggunaan bantuan keuangan secara aturan sudah sesuai karena digunakan untuk kegiatan prioritas bantuan keuangan, namun dari segi penyampaian pelaporan pertanggungjawaban, partai golkar bolmong belum melakukan pelaporan sesuai peraturan

yang berlaku yakni satu tahun sekali. Ini juga yang menyebabkan partai golkar bolmong sering tidak menerima bantuan keuangan partai politik ini, dengan kata lain dilihat dari aspek aturan bantuan keuangan ini belum efektif karena belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Untuk mengetahui apakah tujuan dari Bantuan Keuangan Partai Politik ini sudah di capai, terlebih khusus bagi partai Golkar Bolmong, peneliti mewawancarai Sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong Fadly terkait apakah Partai Golkar Bolmong sendiri sudah berhasil mewujudkan tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik dalam hal ini terkait terciptanya kemandirian partai dalam melaksanakan revitalisasi rekrutmen dan promosi kader, beliau mengatakan :

“Sejujurnya kami masih bisa dibilang jauh dalam mewujudkan tujuan dari diberikannya bantuan keuangan kepada partai kami, apa lagi kalau bicara terkait kemandirian, bisa saya katakan itu masih jauh dari kata mandiri, karena sejujurnya kami masih sangat bergantung juga pada sumbangan-sumbangan baik secara perseorangan ataupun perusahaan, karena jujur saja kalau hanya berharap kepada bantuan keuangan untuk menjalankan roda organisasi masih sangat riskan terjadi.”

Proses rekrutmen kader dan promosi kader secara transparan dan jauh dari praktek-praktek transaksional didalam partai politik menjadi salah satu tujuan dari diberikannya bantuan keuangan bagi partai politik, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua PK DPD II Partai Golkar Mahrin Lolung, beliau mengatakan :

“Terkait rekrutmen kader yang sepengetahuan kami itu masih jauh dari kata transparan, apa lagi kalau mau dikatakan tidak ada proses transaksional. Karena masih terjadi di partai kami ada orang yang baru bergabung sudah di promosikan atau direkrut untuk menjadi calon dalam pemilihan legislative, bahkan sering meng anak tirikan kader yang sudah lama memberi diri bagi partai, hal ini bisa terjadi yah karena masih ada proses transaksional dalam rekrutmen calon dan saya rasa ini bukan terjadi hanya di partai kami tapi hampir di semua partai hal ini terjadi.”

Peneliti juga mewawancarai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD II Partai Golkar Bapak Sulhan, beliau mengatakan :

“Proses kaderisasi yang kami lakukan sudah sesuai dengan mekanisme partai, namun memang kami sering memanfaatkan ajang pemilu maupun pilkada untuk merekrut kader baru untuk partai golkar, hal ini kami lakukan karena terbatasnya anggaran yang kami miliki, dan terkait promosi kader atau perekrutan sebagai calon baik itu calon legislative maupun calon kepala daerah, masih sangat sulit bagi kami untuk tidak melihat persiapan dana secara pribadi, jadi kami sering mengesampingkan kualitas kader bahkan ada juga kader yang tidak terakomodir karena persolan dana.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari diberikannya bantuan keuangan bagi partai politik belum efektif, dilihat dari bagaimana proses rekrutmen kader dan promosi kader untuk maju dalam perhelatan pemilu maupun pilkada yang masih sangat transaksional. Dimana partai masih mengutamakan kaum yang bermodal untuk maju dalam kotekstasi pemilu dan pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa Bantua Keuangan Kepada Partai Politik kepada partai Golkar Bolmong belum efektif, dilihat dari aspek tugas dan fungsi partai golkar bolmong, dimana partai golkar bolmong belum menggunakan bantuan keuangan secara efektif untuk menunjang tugas dan fungsinya, dimana dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk menunjang salah satu fungsi dari partai politik yang dapat dibiayai oleh bantuan keuangan, partai golkar bolmong hanya dapat melaksanakan satu item kegiatan saja, yaitu workshop dengan alasan bahwa bantuan keuangan yang diberikan sangat tidak cukup ununtuk menunjang semua kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan politik.

Terlebih kegiatan partai mengenai pendidikan politik, kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan jangka waktu dua sampai dengan tiga hari dengan beberapa item kegiatan hanya dilakukan dalam waktu satu hari dan hanya dapat terlaksanakan dengan satu item kegiatan yakni workshop. Padahal dalam perencanaan program kerja partai golkar bolmong terkait pendidikan politik ada setidaknya lima kegiaatan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kadernya dalam pemilu. Tidak efektifnya juga Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai golkar bolmong dapat dilihat dari menurunnya jumlah perolehan suara yang didapat oleh partai golkar bolmong dalam Pemilu legislatif 2019 mengalami penurunan perolehan suara yaitu 18.045 suara padahal pada pemilu 2014 partai golkar bolmong berhasil meraih suara

sebanyak 20.218. ini akibat dari menurunnya kualitas kader dalam mensosialisasikan diri dan partainya dalam pemilu. Yang memang tidak mendapatkan pendidikan politik secara maksimal sebagai bekal untuk memperebutkan suara dalam pemilu. Padahal pada tahun 2009 partai golkar bolmong berhasil meraih posisi pemenang pemilu legislatif Kabupaten Bolmong dan berhasil menduduki posisi Ketua DPRD Kabupaten Bolmong.

Selain bantuan keuangan yang sedikit, proses pecairan yang sering terlambatpun menjadikan Bantuan keuangan ini tidak efektif untuk menunjang kegiatan partai golkar bolmong. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa partai golkar bolmong beberapa kali mendapatkan pencairan keuangan diakhir tahun. Ini juga menjadi masalah bagi partai untuk pengurusan tahun berikutnya. Bahkan bukan hanya keterlamabatan pencairan yang dialami namun juga tidak diberikannya bantuan keuangan dalam satu Tahun berjalan karena keterlamabatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya. Selain kegiatan Pendidikan Politik, Bantuan keuangan juga digunakan untuk keperluan oprasional secretariat namun berdasarkan hasil penelitian bantuan keuangan ini belum efektif dalam menunjang oprasional perkantoran, ini dikarenakan selain jumlahnya yang tidak banyak, keterlambatan pencairanpun menjadi penyebab bantuan keuangan tidak efektif digunakan dalam menunjang oprasional secretariat. Karena partai sering menggunakan dana pribadi untuk menunjang oprasional perkatorannya seperti perjalanan dinas dan pembayaran jasa lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dalam studi Efektivitas Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Partai Golkar Bolmong, Peneliti menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Aspek Tugas dan Fungsi

Efektivitas bantuan keuangan partai politik dilihat dari aspek tugas dan fungsi belum efektif, karena bantuan keuangan yang diterima oleh partai golkar bolmong belum dapat memaksimalkan tugas dan fungsi partai, minimnya bantuan keuangan yang diterima oleh partai golkar bolmong mengakibatkan dalam setiap tahun anggaran partai golkar bolmong hanya dapat melaksanakan satu item kegiatan saja dalam rangka pendidkan politik yang menjadi tugas dan fungsi dari partai politik.

2. Aspek Rencana atau Program

Bantuan keuangan partai politik untuk partai golkar bolmong belum efektif dilihat dari aspek program kesulitannya partai mengatur program kerja mereka karena dibatasi oleh besaran bantuan keuangan yang sedikit karena dalam partai harus membuat perencanaan program untuk penggunaan bantuan keuangan partai politik ini harus sesuai dengan jumlah bantuan keuangan yang akan diterima oleh partai politik, oleh karena itu partai hanya dapat memprogramkan satu kegiatan saja dikarenakan melihat dari rencana jumlah bantuan keuangan yang diterima, ini mengakibatkan partai tidak dapat merencanakan dan memprogramkan kegiatan kerjanya secara baik.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Penggunaan bantuan keuangan secara aturan sudah sesuai karena digunakan untuk kegiatan prioritas bantuan keuangan, namun dari segi penyampaian pelaporan pertanggungjawaban, partai golkar bolmong belum melakukan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku yakni satu tahun sekali. Ini juga yang menyebabkan partai golkar bolmong sering tidak menerima bantuan keuangan partai politik, tidak adanya standar pelaporan keuangan juga menjadi masalah terkait perwujudan upaya transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik, padahal ini perlu dilakukan agar supaya proses transparansi dan akuntabilitas partai dapat terlaksana, juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dalam mengelola bantuan keuangan. dengan kata lain dilihat dari aspek aturan bantuan keuangan ini belum efektif karna belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Tujuan dari pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yaitu untuk meningkatkan kemandirian partai baik dalam pelaksanaan rekrutmen sampai pada pengambilan kebijakan partai tanpa ada campur tangan dari pihak diluar partai, belum dapat terwujud dilihat dari masih sangat bergatungnya partai kepada sumbangan- sumbangan perseorangan ataupun perusahaan dalam menunjang proses kaderisasi partai bahkan promosi kader partai untuk maju dalam kotekstasi Pemilu dan Pilkada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Perlu ditinjau kembali terkait penentuan jumlah besaran bantuan keuangan kepada partai politik, agar supaya benar-benar bantuan keuangan ini dapat efektif untuk menunjang kegiatan partai dalam rangka menjalankan fungsinya.

2. Perlu adanya penambahan jumlah besaran bantuan keuangan yang diberikan pemerintah, karena melihat dari hasil penelitian masih banyak rencana program partai yang belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya dana. Selain itu partai juga perlu melakukan perhitungan yang matang terkait anggaran yang ada agar setiap program yang direncanakan akan berjalan maksimal.
3. Terkait penyampaian pelaporan pertanggung jawaban partai golkar bolmong harus lebih meningkatkan kualitas pelaporan pertanggung jawabannya, terkait penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada pemerintah, karna ini juga menjadi kunci efektivitas penggunaan bantuan keuangan. Semakin cepat dan baik penyampaian untuk pelaporan pertanggungjawaban akan berpengaruh pada pencairan bantuan keuangan tahun berikutnya. Selain itu pemerintah juga perlu menyediakan standar laporan akuntansi keuangan agar supaya pelaporan yang diberikan oleh partai politik lebih berkualitas dan akuntabel.
4. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali terkait besar bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik, agar supaya dapat mengakomodir setiap keperluan partai dalam rangka menciptakan partai politik yang mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak elit yang berkepentingan, hanya pada akhirnya memaanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemerintah juga perlu mengatur terkait penggunaan bantuan keuangan yang memang berfokus bagi warga masyarakat luas, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pneliti menemukan partai hampir tidak melibatkan masyarakat umum dalam kegiatan partai mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. B. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif). Bandung: Alfabeta.
- Moleong. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif). Bandung: Alfabet
- Muasaroh. 2010. Aspek-aspek Efektivitas studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.